



Efektivitas Program Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilgub Jatim 2024

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Diva Ayu Pratiwi Firdaus UPN "Veteran" Jawa Timur 22041010021@student.upnjatim.ac.id +6285604471984 Muchamad Rosul Zein UPN "Veteran" Jawa Timur 22041010161@student.upnjatim.ac.id +6287870418026 Risma Aulia Dia Fitaloka UPN "Veteran" Jawa Timur 22041010192@student.upnjatim.ac.id +628970404265 Hendra Wijayanto UPN "Veteran" Jawa Timur hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id +6281908756400	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, April 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Firdaus, D. A. P., Zein, M. R. Fitaloka, R. A. D., & Wijayanto, H. (2025). Efektivitas Program Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilgub Jatim 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1026 -1034.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program sosialisasi yang diimplementasikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Pilgub Jatim 2024 dengan menggunakan pisau analisis efektivitas program oleh Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen KPU Provinsi Jawa Timur, berita, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dinilai tidak efektif menurut teori efektivitas program, karena masih terdapat empat kendala dari lima indikator yang mempengaruhi keberhasilan program sosialisasi. Beberapa kendala yang dimaksud yakni melemahnya kesadaran masyarakat terhadap proses pemilu, khususnya Pilgub Jatim 2024, serta keterbatasan jangkauan kegiatan sosialisasi yang baru mencapai sekitar 60% dari total populasi masyarakat Jawa Timur. Selain itu, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tujuan program sosialisasi belum tercapai secara optimal. Perubahan sikap masyarakat juga masih tergolong rendah, yang tercermin dari masih tingginya tingkat apatisme, terutama di wilayah perkotaan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Sosialisasi, Pemilihan Gubernur

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the socialization program implemented by the East Java Provincial KPU in the 2024 East Java gubernatorial election using the program effectiveness analysis knife by Sutrisno (2007) (in Meutia & Sukmana, 2024). The method used in this study is qualitative descriptive. Primary data were obtained from interviews with Members of the Socialization, Voter Education, and Community Participation Division and Staff of the Community Participation Sub-Division of the East Java Provincial KPU. Meanwhile, secondary data is sourced from East Java Provincial KPU documents, news, and articles. The results of the study show that the socialization program implemented by the East Java Provincial KPU is considered ineffective according to the theory of program effectiveness, because there are still four obstacles out of five indicators that affect the success of the socialization program. Some of the obstacles in question are the weakening of public awareness of the election process, especially the 2024 East Java gubernatorial election, as well as the limited reach of socialization activities which have only reached around 60% of the total population of the people of East Java. In addition, there are internal and external factors that cause the goals of the socialization program to not be achieved optimally. The change in people's attitudes is also still relatively low, which is reflected in the still high level of apathy, especially in urban areas.

Key Words: Program Effectiveness, Socialization, Gubernatorial Election

A. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan menjunjung tinggi asas independensi, keadilan, negosiasi, transparansi, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas (Kurniawati & Mustoffa, 2024). Di Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pemilihan umum merupakan tugas dari KPU Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur adalah Pilgub Jatim 2024. KPU Provinsi Jawa Timur juga memiliki tugas mendorong masyarakat agar melek politik dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara mereka, sebab partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam menyukseskan Pilgub Jatim 2024. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai indikator terlaksanakannya kekuasaan negara yang sah, yang mana kedaulatan rakyat menjadi legitimasi dalam suatu kekuasaan di Indonesia (Iswanto & Pamungkas, 2023).

KPU Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jatim dapat dilihat mulai dari Pilgub tahun 2018 dan Pilgub tahun 2024. Pada Pilgub Jatim 2018 KPU Provinsi Jawa Timur memperoleh presentase partisipasi pemilih sebesar 69.55% dari target nasional yaitu sebesar 77.5% dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 30.155.719 yang terdiri dari pemilih laki-laki sebesar 14.540.367 dan pemilih perempuan sebesar 15.315.367 (Kominfo Jawa Timur, 2018).

Terdapat perbedaan di Pilgub Jatim 2024 mengenai target presentase partisipasi masyarakat. Pada Pilgub Jatim 2024 KPU RI menetapkan Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) bukan lagi target mutlak. Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) merupakan alat yang digunakan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pemilu. Disusun sebagai bagian dari upaya menghadirkan gambaran yang lebih lengkap mengenai tingkat partisipasi publik dalam pemilu. Mencakup perhitungan persentase tingkat keterlibatan masyarakat hadir ke TPS, maupun keikutsertaan saat sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU. Saat ini KPU Provinsi Jawa Timur mencapai Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) sebesar 80% dan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024 sebesar 70.05% (KPU Jatim, 2024b). Menunjukkan adanya jarak cukup besar antara partisipasi masyarakat yang datang saat sosialisasi dengan partisipasi masyarakat yang datang langsung ke TPS. Ketimpangan tersebut menjadi catatan KPU Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang datang langsung ke TPS pada Pilgub Jatim mendatang. Di samping data presentase tingkat partisipasi masyarakat juga diimbangi

dengan data angka golongan putih (golput) yang kian meningkat. Berdasarkan data yang dikutip dari (Metro Tv, 2024), angka golput pada tahun 2018 sebesar 33.08% dan presentase tersebut mengalami peningkatan pada Pilgub Jatim 2024 sebesar 34.68%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah masih terlihat pada setiap pemilihan umum khususnya Pilgub Jatim 2024. Rendahnya partisipasi masyarakat dan meningkatkan angka golongan putih (golput) dipicu oleh beberapa faktor seperti, masyarakat yang apatis terhadap pemilu, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan pemilih pemula yang belum sepenuhnya mengerti proses pemilu. Sedangkan menurut data yang diperoleh dari KPU Provinsi Jawa Timur, terdapat penambahan jumlah sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) sebanyak 202 kegiatan di berbagai lokasi, KPU *Goes to Campus* semula berjumlah 12 kampus menjadi 15 kampus, kirab maskot dan jambore satgas demokrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pilgub di Jatim sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Penelitian tentang peran Komisi Pemilihan Umum daerah dalam pelaksanaan program sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Serang Provinsi Banten yang dikemukakan oleh (Mauludi, 2023) menunjukkan KPU perlu memberikan perhatian khusus kepada para pemilih pemula agar dapat berpartisipasi secara benar dan menghasilkan Pilpres yang berkualitas karena pelaksanaan sosialisasi bagi seluruh sekolah belum terlaksana. Faktor yang menjadi penghambat yaitu minimnya anggaran, sarana dan prasarana, jumlah pegawai terbatas, dan pemilih pemula kurang paham tentang pemilihan umum. Sedangkan penelitian tentang efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang dikemukakan oleh (Wahyudi, 2022) menjumpai partisipasi masyarakat rendah sebab masyarakat Kota Sorong terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga tingkat capaian partisipasi masyarakat Kota Sorong pada pemilihan umum masih tergolong rendah. Beberapa penelitian yang telah diuraikan mempunyai kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Terutama kendala di bagian jumlah SDM baik internal maupun eksternal, rendahnya partisipasi yang diakibatkan kegiatan sosialisasi bersamaan dengan kegiatan lain, masyarakat yang sibuk mengurus urusan pribadi, apatis, serta kurang pahamnya pemilih pemula tentang tahapan pemilu. Tetapi, penelitian tentang sosialisasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Pilgub Jatim 2024 belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat efektivitas program sosialisasi yang diimplementasikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:59) (dalam Najidah & Lestari, 2019), didefinisikan sebagai metrik yang memberikan indikasi sejauh mana tujuan dapat dicapai. Salah satu jenis dari efektivitas sendiri adalah efektivitas program. Menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024), suatu program dapat dikatakan efektif ketika memenuhi 5 (lima) indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai “Efektivitas Program Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub Jatim 2024” dengan tujuan apakah program sosialisasi tersebut efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian tersebut penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh mengenai efektivitas program sosialisasi KPU Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024 dan penelitian ini dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur. KPU Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena KPU Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim serta program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sumber data berasal pada data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen KPU Provinsi Jawa Timur, berita, dan artikel. Teknik penentuan informan dipilih secara sengaja dengan memilih sampel yang mempunyai karakteristik tertentu atau dikenal *purposive sampling*. Penulis juga mengikuti pelaksanaan program sosialisasi sehingga penulis dapat melakukan observasi secara langsung terkait kebutuhan penelitian. Teknik analisis data memakai model Miles dan Huberman (dalam Nasution, 2023) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap suatu isu atau agenda penting (Labolo & Averus, 2022). Hal ini selaras dengan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pemahaman masyarakat mengenai pemilu khususnya pada Pilgub Jatim 2024 melalui pemberian sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Program sosialisasi mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Program sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur beragam mulai dari tatap muka sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih), *KPU Goes to Campus*, kirab maskot, dan jambore satgas demokrasi. Efektivitas program sosialisasi KPU Provinsi Jawa Timur diukur menggunakan teori Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024), terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1. Pemahaman program

Indikator pemahaman program menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024) pengukuran efektivitas program pada hakikatnya menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, koordinasi yang terpadu, dan evaluasi secara menyeluruh agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Indikator pemahaman program digunakan untuk memastikan bahwa program yang telah disusun dapat bermanfaat bagi masyarakat serta mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Dalam menyusun program sosialisasi, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian terlebih dahulu agar program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, KPU Provinsi Jawa Timur juga selalu melakukan evaluasi dan inovasi terkait program sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan. Bentuk dari evaluasi dan inovasi yang dilakukan yaitu adanya penambahan jumlah sosialisasi dengan berbagai metode baik secara langsung atau tidak langsung. Penambahan jumlah sosialisasi pada tahapan Pilgub Jatim 2024 terdiri dari sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) sebanyak 202 kegiatan di berbagai lokasi, *KPU Goes to Campus* semula berjumlah 12 kampus menjadi 15 kampus, kirab maskot yang dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Timur dan jambore satgas demokrasi. Tujuannya agar program sosialisasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan tingkat partisipasi pemilih meningkat pada Pilgub Jatim 2024. Adapun materi utama yang disampaikan melalui program sosialisasi terdiri dari tahapan, program, jadwal, dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu serta materi lain yang relevan dengan tujuan program sosialisasi.



Gambar 1. *KPU Goes to Campus* Universitas Negeri Malang
Sumber: Instagram KPU Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur, program sosialisasi ini sudah dapat dipastikan dipahami oleh masyarakat secara umum. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pemilih di setiap agenda pemilihan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana prosedur penggunaan hak pilih yang benar. Selain itu, saat ini pembahasan politik mulai ramai dibicarakan oleh masyarakat, hal

tersebut menandakan bahwa masyarakat sudah mulai memahami akan kegiatan politik dan pentingnya berdemokrasi. Selanjutnya, masyarakat juga dianggap telah memahami program sosialisasi KPU Provinsi Jawa Timur melalui respon pertanyaan maupun saran yang diberikan masyarakat pada saat pelaksanaan program sosialisasi. Tetapi meskipun sebagian besar masyarakat sudah memahami program sosialisasi ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS dalam menyalurkan hak pilihnya masih cukup rendah.

2. Tepat sasaran

Menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024), tepat sasaran menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program dengan cara melihat bagaimana pengelola membuat program bagi kelompok sasaran atau tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarannya. KPU Provinsi Jawa Timur mengelompokkan sasaran sosialisasi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan umur, geografis, dan identitas. Misalnya pemilih pemula, masyarakat umum di daerah perkotaan maupun perdesaan, dan mahasiswa. Dalam upaya menjangkau seluruh kelompok sasaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan sosialisasi. Inovasi tersebut tidak hanya berfokus pada metode pembelajaran konvensional, tetapi juga memanfaatkan pendekatan kreatif seperti musik dan bentuk seni lainnya, dengan tujuan agar materi substansial dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Meskipun KPU Provinsi Jawa Timur telah menerapkan berbagai model sosialisasi, cakupan penyampaian belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah keterbatasan, termasuk terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, serta tantangan geografis dan demografis. Provinsi Jawa Timur sendiri terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 31 juta jiwa, yang menuntut strategi sosialisasi yang lebih masif, terstruktur, dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Sebagai salah satu contoh strategi inovatif dalam mensosialisasikan pemilu, KPU Provinsi Jawa Timur memanfaatkan sarana pengeras suara di tempat-tempat ibadah. Tiga hari menjelang hari pemungutan suara (H-3), seluruh masjid dan mushola di wilayah Jawa Timur mengumumkan informasi penting terkait pemilu, seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), tata cara pencoblosan, serta waktu pelaksanaan pemungutan suara. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh media massa atau teknologi digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur, kegiatan sosialisasi pemilu yang telah dilaksanakan dinilai cukup tepat sasaran. Jika diukur menggunakan skala nilai, efektivitas kegiatan tersebut diperkirakan berada pada rentang 8 hingga 9 dari skala 10. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari cakupan terhadap keseluruhan masyarakat di Jawa Timur, tingkat partisipasi yang berhasil dijangkau masih tergolong rendah. Dari total lebih dari 30 juta penduduk yang tercatat dalam Indeks Partisipasi Pemilih (IPP), kegiatan sosialisasi baru mampu menjangkau sekitar 19 juta jiwa, atau sekitar 60% dari populasi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi secara umum telah berjalan dengan baik, distribusi dan jangkauan informasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah belum tersentuh oleh media komunikasi.

3. Tepat waktu

Tepat waktu merupakan salah satu indikator menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024) yang terdapat pada efektivitas program. Ketepatan waktu atau tepat waktu ini berhubungan dengan kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tepat waktu ini menjadi salah satu indikator yang penting untuk menilai apakah program yang dilakukan sudah tepat waktu sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Pada program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur program sosialisasi tersebut sudah ditentukan jadwal dan tenggalnya berdasarkan kalender tahapan pemilu. Kalender tahapan pemilu ini merupakan kalender khusus yang berisi memuat seluruh tahapan tahapan pada pemilu khususnya pada Pilgub Jatim 2024 mulai dari tahap perencanaan program dan anggaran hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Kalender tahapan inilah yang menjadi acuan oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk menentukan tema apa saja yang akan dibawakan pada sosialisasi serta kapan saja sosialisasi tersebut dilaksanakan. Seperti ketika kalender tahapan pemilu bertepatan pada tahapan tentang pindah pilih maka sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur juga membawakan

tentang pindah pilih mulai dari kapan pindah pilih dilakukan hingga berakhirnya proses pindah pilih yang bisa diikuti oleh masyarakat. Selain itu, ketika kalender tahapan bertepatan dengan kampanye maka sosialisasi yang akan dilaksanakan juga membawakan tentang kampanye.

Tabel 1. Keseluruhan Program Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Timur pada Pilgub Jatim 2024

NO	KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN
1	Sosialisasi tatap muka dan pendidikan pemilih	Seluruh wilayah Jawa Timur	2 Agust-26 Nov 2024	Pemilih pemula, pemilih perempuan dan komunitas atau organisasi masyarakat
2	KPU Goes to Campus	Surabaya, Madura, Sidoarjo, Tulungagung, Probolinggo, Malang, Jember	30 Sept-22 Nov 2024	Pemilih pemula atau mahasiswa
3	Gelar seni budaya	Mojokerto dan Trenggalek	21-22 Nov 2024	Seluruh masyarakat
4	Kirab maskot	Seluruh wilayah Jawa Timur	24 Jul-24 Okt 2024	Seluruh masyarakat
5	Media gathering	Surabaya	16 Agust-17 Nov 2024	Media atau jurnalis
6	Jalan sehat	Kediri	10 Nov 2024	Seluruh masyarakat
7	Deklarasi kampanye damai	Surabaya	24 Sept 2024	Seluruh masyarakat
8	Jambore satgas demokrasi Jawa Timur	Surabaya	21 Sept 2024	Organisasi mahasiswa
9	Sosialisasi melalui media sosial	Surabaya	26 Jun-18 Nov 2024	Seluruh masyarakat
10	Lomba jurnalistik, foto, dan video	Surabaya	8 Jul-25 Nov 2024	Seluruh masyarakat
11	Lomba kartun	Surabaya	8 Jul-25 Nov 2024	Seluruh masyarakat

Sumber: Diadaptasi dari data KPU Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan program sosialisasi kerap mengalami pergeseran dari jadwal yang telah direncanakan. Pergeseran tersebut umumnya disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu dari pihak mitra atau penyelenggara kegiatan sosialisasi (pihak kedua), bukan dari internal KPU. Hal ini terjadi karena adanya benturan jadwal dengan instansi, komunitas, atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi. Terjadinya perubahan jadwal sosialisasi ini juga tentunya memiliki dampak terhadap pelaksanaan program sosialisasi lainnya sehingga perlu adanya penyesuaian kembali jadwal agar seluruh pelaksanaan program sosialisasi tetap bisa dilakukan. Meskipun demikian, KPU Provinsi Jawa Timur mampu merespons perubahan tersebut secara adaptif melalui penjadwalan ulang tahapan sosialisasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Tercapainya tujuan

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Indikator tercapainya tujuan menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024) digunakan untuk melihat apakah tujuan dari dibentuknya suatu program dapat tercapai atau tidak. Tercapainya tujuan dapat dilihat melalui ketepatan waktu dalam pelaksanaan program dan terpenuhinya maksud dari program tersebut.

Adapun tujuan dari program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat yaitu menyebarkan informasi terkait pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, tujuan dari program sosialisasi ini adalah untuk menghindari adanya konflik pada saat pemilu. Konflik yang ingin dihindari seperti demo anarkis terkait penolakan hasil pemilu sehingga dapat mengganggu tahapan pemilu itu sendiri. Maka dari itu, tujuan dari program sosialisasi ini yakni juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara penyelesaian konflik penolakan hasil pemilu melalui jalur hukum seperti gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur, tujuan dari program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dinilai belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya meningkat 0,5% dan penambahan jumlah golongan putih (golput) pada Pilgub Jatim 2024. Belum tercapainya tujuan program sosialisasi sendiri disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan waktu dan anggaran serta program ini sering beririsan dengan kegiatan lain sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kegiatan pemilu. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa program sosialisasi atau kegiatan pemilu itu tidak penting. Hal tersebut yang menjadi hambatan utama KPU Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

5. Perubahan nyata

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan tentu tidak terlepas dari dampak atau perubahan bagi sasaran mereka. Sesuai teori menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024) perubahan nyata dimaknai mengidentifikasi perubahan atau dampak sebelum dan sesudah program tersebut dilakukan. Program dapat dianggap berhasil jika terdapat perubahan positif. Tak jauh berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur. Setelah serangkaian sosialisasi, perubahan nyata sikap dan perilaku masyarakat pun berubah terutama di kalangan mahasiswa dan anggota KPPS. Mahasiswa yang sebelumnya cenderung menanggapi isu-isu terkait pemilu secara pasif mulai menunjukkan minat untuk lebih terlibat. Mereka bergabung dalam Relawan Demokrasi dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi pada pemilu. Hal yang sama tampak di anggota KPPS, semakin menyadari peran strategis mereka dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Perubahan ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat guna berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur, sosialisasi menghasilkan perbedaan respon antara masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, khususnya seperti di Surabaya, ditemukan kecenderungan sikap yang semakin apatis terhadap pemilu. Sikap apatis ini tidak semata-mata disebabkan oleh kotak kosong, melainkan lebih mengarah menurunnya kepedulian masyarakat atas keberlangsungan proses demokrasi. Masyarakat beranggapan pemilu sekadar acara formal saja, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan bagi kehidupan mereka. Padahal suara tertinggi akan menentukan arah kepemimpinan yang mendorong transformasi ke sisi baik atau sebaliknya. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk KPU Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat, terutama di masyarakat perkotaan yang memiliki akses informasi lebih luas, ekonomi modern, dan pendidikan tinggi, tetapi justru kurang berpartisipasi pada proses demokrasi atau pemilu. Sehingga, KPU Provinsi Jawa Timur memetik pelajaran penting dengan mengikuti tren kekinian, memenuhi kebutuhan moril, dan kebutuhan langsung pemilih sebagai strategi mengatasi permasalahan ini. Namun, metode sosialisasi tetap muka secara langsung tetap diimplementasikan sebagai bentuk pendekatan personal dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang dinamis dan menarik agar pesan-pesan pemilu dapat tersalurkan dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024) diperoleh kesimpulan; (1) Pemahaman program, KPU Provinsi Jawa Timur telah memastikan bahwa masyarakat dapat memahami program sosialisasi yang telah dilakukan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pemilih pada setiap agenda pemilihan dan tata cara pencoblosan yang benar serta meningkatnya pembicaraan topik mengenai politik. (2) Tepat Sasaran, KPU Provinsi Jawa Timur mengelompokkan sasaran menjadi tiga yaitu berdasarkan umur, identitas, dan geografis. Yang mana kelompok sasaran ini terdiri dari pemilih pemula, mahasiswa, dan masyarakat umum di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kegiatan sosialisasi cukup efektif menjangkau sasaran yang ditentukan, akan tetapi baru bisa meraih sekitar 19 juta jiwa, atau sekitar 60% dari 30 juta penduduk di Jawa Timur. (3) Tepat waktu, tepat waktu merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan program. KPU Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan sosialisasi pada Pilgub Jatim 2024 sering mengalami pergeseran tanggal pelaksanaan namun, KPU Provinsi Jawa Timur dapat merespon dengan baik perubahan jadwal pelaksanaan program sosialisasi dengan mengatur ulang jadwal sehingga pelaksanaan program sosialisasi tetap dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. (4) Tercapainya tujuan, dalam mencapai tujuan program sosialisai pada Pilgub Jatim 2024 KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, tujuan dari program sosialisasi ini belum sepenuhnya maksimal hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya naik 0,5% dan penambahan jumlah golongan putih (golput) pada Pilgub Jatim 2024. (5) Perubahan nyata, Keterlibatan mahasiswa mulai meningkat pada proses tahapan pemilu. Banyak mahasiswa yang tergabung dalam relawan demokrasi dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, perubahan nyata juga dirasakan pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada wilayah pedesaan masyarakat cenderung terbuka pada sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur, sedangkan di wilayah perkotaan seperti Surabaya yang mempunyai partisipasi terendah, terlihat kecenderungan sikap apatis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam Pilgub Jatim 2024 menurut indikator keberhasilan program menurut Sutrisno (2007) (dalam Meutia & Sukmana, 2024) dinilai belum efektif. Untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi, KPU Provinsi Jawa Timur disarankan mendorong inovasi dan kreativitas, termasuk bekerja sama dengan pihak swasta guna menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, sehingga minat dan keterlibatan masyarakat meningkat. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemaksimalan peran anggota, baik internal maupun eksternal KPU Provinsi Jawa Timur perlu dioptimalkan agar program sosialisasi berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

E. Referensi

- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192>
- Kominfo Jawa Timur, D. (2018). *Rapat Pleno, KPU Tetapkan DPT Pilgub Jatim Capai 30.155.719 Orang*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/rapat-pleno-kpu-tetapkan-dpt-pilgub-jatim-capai-30-155-719-orang>
- KPU Jatim. (2024). *KPU Provinsi Jawa Timur Gelar Goes to Campus Universitas Negeri Malang*. https://www.instagram.com/p/DCwMR_7z9Vp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
- KPU Jatim. (2024). *Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024*. <https://www.instagram.com/p/DDgQb3XTjXD/?igsh=dzc3YXd0eWw0amh3>
- Kurniawati, E., & Mustoffa, A. F. (2024). Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc KPU Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 2124–2145.
- Labolo, M., & Averus, A. (2022). *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Cv Sketsa Media.
- Mauludi, F. F. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Serang Provinsi Banten. 1–12. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13638>
- Metro Tv. (2024). *LSI Denny JA Ungkap Fenomena Golput di Pilkada 2024 Meningkat*.

- <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C3VyP-lsi-denny-ja-ungkap-fenomena-golput-di-pilkada-2024-meningkat>
- Meutia, N. H., & Sukmana, H. (2024). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(04), 1–14.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Harfa Creative.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Wahyudi, G. D. (2022). Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kpu Kota Sorong Provinsi Papua Barat. 1–10.